

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Buku Obor, 2021.
- Anggono, Bayu Dwi. *Pokok-pokok pemikiran penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Asshiddiqie, Jimmly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- _____, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Cetakan Kedua*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Black, Hendrsy Campbell. "Black's Law Dictionary." West Publishing Co. USA, 1978.
- Citriadin, Yudin. *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar*. Mataram: Sanabil, 2020.
- Hadi, Yonathan Setianto. *Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia*. Edisi II. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Penyusunan APBN, 2014.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Penyusunan Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill, 1992.
- MD, Mahfud. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas, dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Press, 2023.
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Saifuddin. *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.

- Salim, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Saptomo, Ade. *Pokok-Pokok Metodologi Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.
- Setiadi, Wicipto. *Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Simatupang, Dian Puji N. *Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Sirajuddin, Fatkhurohman, dan Zulkarnain. *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sumardjono, Maria SW. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1999.
- Suriasumantri, Jujur J. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wilcox, D. *The Guide to Effective Participation*. Sussex UK: Partnerships Online, 2003.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).

Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 668).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6056).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 199).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1715).

3. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 tentang pengujian atas Undang-Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara).

4. Jurnal dan Hasil Penelitian

- Abadi, Songga Aurora. “Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Konteks Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (18 Desember 2021). <https://doi.org/10.51825/sjp.v1i2.12011>.
- Ahmad, Rival G. “Dari Parlemen ke Ruang Publik: Menggagas Penyusunan Kebijakan Partisipatif.” *Jurnal Hukum Jentera* 02 (2003.): 109.
- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Planning Association* 85, no. 1 (2 Januari 2019): 24–34. <https://doi.org/10.1080/01944363.2018.1559388>.
- Attamimi, A. Hamid. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita V).” Disertasi Doktor Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 1990.
- Badan Legislasi DPR RI. “Evaluasi Prolegnas 2005-2009,” 2009.
- BPHN. “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir).” BPHN Kemenkumham, April 2022.
- . “Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN.” *BPHN Kemenkumham*, 2008, 260.
- Chandra Sy, Helmi, dan Shelvin Putri Irawan. “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 766–93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- . “Perluasan Makna Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (1 Desember 2022): 766–93. <https://doi.org/10.31078/jk1942>.
- Fajri, M Nurul. “Legitimacy Of Public Participation In The Establishment Of Law In Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (25 Maret 2023): 123–43. <https://doi.org/10.31078/jk2017>.
- Hamdani, Fathul, Ana Fauzia, dan Euard Awang Maha Putra. “Penerapan Metode RIA dalam Pembentukan Perjanjian Internasional: Upaya Optimalisasi Keterlibatan Rakyat dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan.” *Jurnal Yuridis* 10, no. 1 (Juni 2023): 45–65.

- Huda, Ni'matul. "Catatan Akhir Tahun: Pembentukan Undang-Undang yang belum Bermakna di Indonesia disampaikan pada Seminar Refleksi Akhir Tahun 2022: Potret dan Tantangan ke Depan." *Fakultas Hukum UII*, Desember 2022.
- Mahole, Imanuel. "Pengaturan Ideal Terhadap Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Melalui Daftar Kumulatif Terbuka." *Jurnal Legislasi* 20, No. 3 (September 2023): 95–109.
- Irwansyah. "Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dan Implikasi Yuridis atas Penolakannya oleh DPR." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Komisi II DPR RI. "Laporan Komisi II dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya" Komisi II DPR RI, 2022.
- _____. "Laporan Komisi II dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Sumatera selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali" Komisi II DPR RI, 2023.
- Utomo, Nurrahman Aji. "Mengurai Kerangka Legislasi sebagai Instrumen Perwujudan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi* 13, no. 4 (2016): 886–910. <https://doi.org/10.31078/jk13410>.
- Ramur, Irham. "Analisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Rustam, Shenny. "Konsep Partisipasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Sekretariat Badan Legislasi DPR RI. "Realisasi Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2024 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024.," 2023.
- Setiadi, Wicipto. "Fast-Track Legislation sebagai Bentuk Peningkatan Supremasi Hukum" disampaikan pada Diskusi Terbuka Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Desember 2020.
- Sinaga, Febri Wiyata. "Ratifikasi dan Pengesahan dalam Perjanjian Internasional ((Studi Kasus: Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara

Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional)).”
Jurnal Law Pro Justitia VI, no. 1 (Desember 2020): 86–97.

5. Sumber dari Dalam Jaringan (*Online Resources*)

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“BUDGET GOES TO CAMPUS: Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024),” Agustus 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=m-PdfDITSgU>.

———. “Konsultasi Publik RUU APBN TA 2024: Tingkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan APBN,” Agustus 2023. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/konsultasi-publik-ruu-apbn-ta-2024-tingkatkan-partisipasi-publik-dalam-proses-penyusunan-apbn>.

———. “Proses Bisnis Penyusunan APBN,” 2022. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/agenda-dja>.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
“Apa itu Nota Keuangan?” *Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 2023. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/makassar2/id/data-publikasi/artikel/3169-apa-itu-nota-keuangan.html#:~:text=Nota%20Keuangan%20adalah%20dokumen%20yang,biasanya%20selama%20satu%20tahun%20fiskal>.

DPR RI. “DPR RI Sahkan Perppu tentang Pemilu Jadi Undang-Undang,” April 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43968/t/DPR%20RI%20Sahkan%20Perppu%20Tentang%20Pemilu%20Jadi%20Undang-Undang>.

———. “DPR Setujui RUU APBN Jadi Undang-Undang,” September 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46672/t/DPR%20Setujui%20RUU%20APBN%202024%20Jadi%20Undang-Undang>.

———. “Tim Komisi II Bahas dan Terima Aspirasi Pemprov Jabar tentang RUU Provinsi,” Maret 2023. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43700/t/Tim%20Komisi%20II%20Bahas%20dan%20Terima%20Aspirasi%20Pemprov%20Jabar%20tentang%20RUU%20Provinsi>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Hukumonline. “Keterlibatan DPR dalam Perjanjian Internasional diperluas, Ahli Sarankan Prosedur Lebih Rinci,” Januari 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterlibatan-dpr-dalam-perjanjian->

internasional-diperluas--ahli-sarankan-prosedur-lebih-rinci-
lt5c2f081e81922?page=2.

Indonesian Parliamentary Center. “Informasi Legislasi: Cakupan Sileg,” t.t.
<https://openparliament.id/sistem-informasi-legislasi/>.

Jejak Parlemen. “Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Barat Daya — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli (TA) Baleg DPR RI dan Pengusul,” April 2022.
<https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Legislasi-Pleno-TA-Baleg-Pengusul-Harmonisasi-RUU-Papua-Barat-Daya>.

———. “Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya — Rapat Pleno Badan legislasi (Baleg) DPR RI dengan Pengusul,” Juni 2022.
<https://wikidpr.org/rangkuman/Baleg-Pleno-Legislasi-Pengusul-Komisi-2-Pengambilan-Keputusan-Harmonisasi-RUU-Pembentukan-Provinsi-Papua-Barat-Daya>.

———. “Penyampaian Aspirasi RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya - Komisi 2 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Provinsi Papua Barat.” *WikiDPR*, September 2022.
<https://wikidpr.org/rangkuman/Komisi2-Audiensi-RDPU-Tim-Provinsi%20Papua-Barat-RUU-Pembentukan-Provinsi-Papua-Barat-Daya>.

Kompas.com. “Jimly Kritik Perppu Cipta Kerja: ‘Rule by Law’ yang Kasar dan Sombong,” 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/04/21441661/jimly-kritik-perppu-cipta-kerja-rule-by-law-yang-kasar-dan-sombong?page=all>.

Konstitusi, Mahkamah. “Pernyataan Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam persidangan sebagaimana dikutip dalam laman Mahkamah Konstitusi, 2021, ‘MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun,’” 2021.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816>.

Perludem. “Perludem Minta Ruang Partisipasi Publik Dibuka untuk Perpu Pemilu 2024,” Juli 2022. <https://perludem.org/2022/07/10/perludem-minta-ruang-partisipasi-publik-dibuka-untuk-perpu-pemilu-2024/>.

PSHK. “Memperluas Cakupan Partisipasi dalam Proses Legislasi.” *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*, 2015. <https://pshk.or.id/blog-id/memperluas-cakupan-partisipasi-dalam-proses-legislasi/>.

Putra, Antoni. “KUHP, Uji ‘Checklist’, dan Jaminan Partisipasi Masyarakat.” *Kompas.id*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/09/kuhp-uji-checklist-dan-jaminan-partisipasi-masyarakat>.

Wahid, Hidayat Nur. “Kritik Perppu Cipta Kerja, HNW: Seharusnya Presiden Laksanakan Putusan MK, Bukan Malah Membuat Perppu yang Dinilai Abaikan MK.” *MPR RI*, Januari 2023. <https://www.mpr.go.id/berita/Kritik-Perppu-Cipta-Kerja,-HNW:-Seharusnya-Presiden-Laksanakan-Putusan-MK,-Bukan-Malah-Membuat-Perppu-yg-Dinilai-Abaikan-MK>.

Yusmic, Daniel. “Kuliah Umum ‘Perppu Suatu Kajian dari Perspektif Hukum Tata Negara Normal dan Hukum Tata Negara Darurat’.” Mahkamah Konstitusi, 2023.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19598&menu=2>.

Treasury Secretary Board of Canada. “Guidelines for Effective Regulatory Consultations.” *Treasury Board of Canada Secretariat*, 2007.
<http://www.tbs-sct.gc.ca>.